

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dengan melihat dinamika politik di Timur Tengah yang dari dulu tidak juga ditemukan pemecahannya, maka dari itu penulis ingin mengangkat kembali tentang masalah konflik yang terjadi di Timur Tengah dalam hal ini adalah konflik yang terjadi antara Israel – Palestina. Konflik ini dimulai karena orang-orang Israel ingin membangun negara mereka di atas tanah Arab. Hal ini menyebabkan orang Arab warga Palestina terusir dari negaranya sendiri. Aksi terror Israel dimaksudkan untuk mengusir warga Palestina dari tanah airnya dengan tujuan tanah itu untuk membangun pemukiman warga Israel. Hal itu menyebabkan warga Palestina seakan menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri.

Pergantian pemimpin Negara Israel terbukti tidak membawa perubahan apa-apa terhadap perdamaian kedua negara tersebut. Perundingan yang sering dilakukan dimana proses perdamaian yang awalnya sudah disetujui bersama kemudian dilanggar oleh salah satu pihak. Konsep perdamaian yang berbeda dari masing-masing negara menyebabkan perdamaian yang diharapkan masih harus menempuh jalan yang panjang. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina seakan telah menjadi konflik yang abadi yang tak kunjung berakhir mesti telah berulang kali diupayakan dengan perundingan. Semua itu tidak lepas dari peranan

perdana menterinya selaku pembuat keputusan dan kebijakan. Di mana para tentara dan pejabat pemerintahannya akan sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang dilontarkan oleh pemimpinnya.

Berdasarkan pembahasan di atas dan melihat-lihat kondisi yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang sosok pemimpin Israel dan memilih **Orientasi Politik Pemerintahan Benyamin Netanyahu yang Kedua Terhadap Perdamaian Israel-Palestina** sebagai judul skripsi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk lebih mengenal dan menganalisa konflik yang terjadi antara Israel-Palestina khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan garis keras Benyamin Netanyahu.
2. Mengetahui orientasi politik pemerintahan Benyamin Netanyahu yang kedua terhadap konflik Israel-Palestina.
3. Penerapan dari seluruh mata kuliah yang didapat oleh penulis ketika duduk dibangku perkuliahan.
4. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 yaitu Sarjana Ilmu Politik (S.IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Sejarah Israel dimulai ketika Dr. Theodor Herzl dan Dr. Chaim Weizmann mengorganisasi sebuah gerakan yang mereka namakan gerakan Zionis. Gerakan Zionis adalah gerakan untuk membentuk kembali Negara Yahudi di Palestina.¹ Jika dilihat berdasarkan agama, istilah ini merujuk pada istilah agama Yahudi tidak peduli mereka keturunan Yahudi atau tidak. Jika dilihat berdasarkan etnisitas, kata ini merujuk pada keturunan Eber atau Yakub, anak Isak, anak Abraham dan Sarah. Sejarah panjang Yahudi dan gerakan zionis ini kemudian menghasilkan berbagai konflik yang berkepanjangan di dunia internasional. Salah satunya adalah konflik Israel – palestina yang telah berlangsung sangat lama. Konflik tersebut banyak muncul terutama setelah berdirinya Negara Israel. Israel kemudian seperti menjadi musuh bersama Negara – Negara di kawasan Timur Tengah.

Israel diproklamirkan pada tanggal 14 Mei 1948 oleh David Ben Gurion dan sehari kemudian Israel yang baru terbentuk ini langsung di serang oleh tentara dari Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, Iran, dan Negara Arab lainnya. Tetapi Israel berhasil memenangkan peperangan ini dan malah merebut kurang lebih 70 % dari luas total wilayah daerah mandat PBB Britania Raya, Palestina. Perang ini menyebabkan banyak kaum pengungsi Palestina yang mengungsi dari daerah Israel. Tetapi disisi lain, banyak pula kaum Yahudi yang di usir dari Negara – Negara Arab.

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Zionis> diunduh pada 23 Nopember 2009

Kebijakan – kebijakan yang diambil oleh Israel tentu tak lepas dari peran para perdana menteri. Sejak berdirinya, Israel kini sudah dipimpin oleh 15 orang perdana menteri. Walaupun hampir setiap kurun waktu Israel selalu berganti perdana menteri dari partai yang berbeda tetapi tetap saja kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpin Israel tersebut selalu merugikan negara lain terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah. Bahkan tidak jarang kebijakan tersebut berujung pada peperangan seperti yang terjadi dengan kebijakan yang diambil oleh Perdana Menteri Israel terkait masalah pembentukan Negara Palestina.

Pada tahun 1996, Pemilu di Israel dimenangkan secara tipis oleh Netanyahu dari partai kanan, yang berarti kemenangan Yahudi yang anti perdamaian. Netanyahu mengulur-ulur waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian. Ia menolak adanya negara Palestina, agar Palestina tetap sekedar daerah otonom di dalam Israel . Ia bahkan ingin menunggu/menciptakan dan kontelasi baru (pemukiman Yahudi di daerah pendudukan, bila perlu perluasan hingga ke Syria dan Yordania) untuk sama sekali membuat perjanjian baru.

Benyamin Netanyahu merupakan salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah politik Israel. Netanyahu atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bibi lahir di Israel pada 21 Oktober 1949, dikenal dengan pendekatan garis keras dalam masalah konflik Israel dan Palestina. Sebelum ia menjadi Perdana Menteri Israel (tahun 1996-1999), dia telah aktif dalam dunia politik Israel.

Sepak terjang Bibi semasa menjadi Perdana Menteri yang dengan tegas mendukung dan memberikan akses seluas-luasnya untuk pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki sejak perang 1967. Tindakannya ini kemudian menjadi sasaran kutukan dari Negara-negara Arab. Namun pada akhirnya Bibi turun dari jabatannya setelah di terpa berbagai isu terutama terlibat isu skandal korupsi dan kemudian ditinggalkan oleh pengikutnya di sayap kiri.

Pada tanggal 28 September 2000, Ariel Sharon (Ketua Partai Likud pada saat itu) melakukan kunjungan ke Masjid Al Aqsa yang kemudian ikut memicu Intifada II (Intifada Al Aqsa).²

Pada saat itu Israel sedang menerapkan sebuah rencana pemisahan diri yang kontroversial yang diajukan oleh Perdana Menteri Ariel Sharon. Menurut rencana yang diajukan kepada AS, Israel berpendapat bahwa mereka tidak akan menyingkirkan seluruh “kehadiran sipil dan militer yang permanen” di Jalur Gaza (yaitu 21 pemukiman Yahudi di sana, dan 4 pemukiman di Tepi Barat), namun akan “mengawasi dan mengawal kantong-kantong eksternal di darat, akan mempertahankan kontrol eksklusif di wilayah udara Gaza, dan akan terus melakukan kegiatan militer di wilayah laut dari Jalur Gaza.

Pada bulan April 2003, Presiden AS, George W. Bush mengeluarkan rencana perdamaian antara Israel dan Palestina yang dinamai “Road Map”. Road Map menekankan berdirinya Negara Palestina pada tahun 2005 dan Israel secara

² <http://www.guardian.co.uk/israel/story/0,2763,554625,00.html> diunduh pada 23 Nopember 2009

berdampingan dan didukung oleh Uni Eropa, Rusia, PBB terutama AS. Dalam Road Map tersebut juga disebutkan bahwa pemerintahan Israel harus mwmbekukan seluruh konstruksi perumahan di pemukiman Yahudi di jalur Gaza dan Tepi Barat serta mengundurkan diri secara bertahap dari zona-zona otonomi Palestina yang diduduki sejak terjadinya konflik.³ Perdana Menteri saat itu, Ariel Sharon setuju untuk melakukan penarikan mundur pasukan Israel di Jalur Gaza dan penarikan pemukina Yahudi yang ada di sana. Hal ini kemudian menjadi pertentangan di tubuh Likud dan membuat Sharon keluar dari Likud dan membentuk Partai Kadima.

Di hari kemenangan Partai Kadima pada pemilu tanggal 28 Maret 2006 di Israel, Ehud Olmert yang kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri Israel menggantikan Ariel Sharon yang berhalangan datang karena sakit berpidato. Dalam pidato kemenangan partainya, Olmert berjanji untuk menjadikan Israel negara yang adil, kuat, damai, dan makmur, menghargai hak-hak kaum minoritas, mementingkan pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta terutama sekali berjuang untuk mencapai perdamaian yang kekal dan pasti dengan bangsa Palestina. Olmert menyatakan bahwa sebagaimana Israel bersedia berkompromi untuk perdamaian, ia mengharapkan bangsa Palestina pun harus fleksibel dengan posisi mereka. Ia menyatakan bahwa bila Otoritas Palestina, yang kini dipimpin Hamas, menolak mengakui Negara Israel, maka Israel “akan menentukan nasibnya di tangannya sendiri” dan secara langsung menyiratkan aksi sepihak.

³ <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/20062.htm> diunduh pada 23 Nopember 2009

Masa depan pemerintahan koalisi ini sebagian besar tergantung pada niat baik partai-partai lain untuk bekerja sama dengan perdana menteri yang baru terpilih.

Sementara itu sebelum terjadinya serangan habis-habisan Israel ke Gaza pada 27 Desember 2008, sudah terjadi serangan-serangan kecil di antara kedua belah pihak di sekitar Jalur Gaza, disebabkan Israel menutup tempat-tempat penyeberangan atau jalur komersial ke Gaza sehingga pasokan bahan bakar minyak terhenti, yang memaksa satu-satunya pusat pembangkit listrik di Jalur Gaza tutup.

Salah satu hal yang mencolok pada diri Ehud Olmert adalah dia mendukung *Gaza Disengagement Plan* yaitu penarikan Israel secara sepihak dari daerah pendudukan di Jalur Gaza. Ini kebijakan yang diambil Perdana Menteri Ariel Sharon, ketika itu, yang menjadi benih perpecahan Partai Likud dan kemudian lahirnya Partai Kadima. Padahal, Olmert yang menerima tongkat kepemimpinan sebagai perdana menteri dari Ariel Sharon yang terkena stroke ini sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang lantang menentang penarikan mundur Israel dari daerah pendudukan hasil Perang 1967. Tokoh yang lahir pada 30 September 1945 di wilayah Palestina, yang waktu itu masih di bawah mandat Inggris ini, dahulu juga dikenal sebagai penentang Perjanjian Perdamaian Camp David.

Pada Februari 2009 Israel kembali mengadakan pemilihan umum untuk memilih 120 anggota parlemen atau yang biasa di sebut *Knesset*. Parlemen hasil Pemilu ini merupakan Parlemen ke -16 Israel. Pemilu kali ini, menurut daftar

resmi, diikuti oleh 30 partai dari berbagai aliran: kiri, kanan, tengah, agama, etnis, dan nasionalis. Tiga partai besar yang diperkirakan akan bersaing memperebutkan kursi di parlemen adalah Kadima (partai baru pecahan dari Partai Likud dan berhaluan tengah), Buruh (kiri tengah, demokratik sosial), dan Likud (kanan tengah). Partai pemenang pemilu akan mendapat mandat dari Presiden untuk membentuk pemerintahan baru dan pemimpin dari partai terbesar dalam parlemen akan dipilih untuk menjadi perdana menteri baru.

Israel beraliran pemerintahan Parlementer. Kedudukan Presiden di Israel hanya sebagai simbolik, sedangkan kekuasaan eksekutif berada di tangan seorang perdana menteri yang dipilih dari ketua partai politik. Seorang kandidat perdana menteri membutuhkan dukungan paling sedikit 61 anggota (setengah lebih satu jumlah anggota Knesset). Dalam hasil pemilu Parlemen Israel tersebut, Partai Kadima pimpinan Tzeves Livni meraih total 28 kuris di *Knesset*, Partai Likud memperoleh 27 kursi. Meskipun Partai Kadima unggul tipis di atas Parta Likud, namun sejumlah pihak yakin Netanyahulah yang akan terpilih menjadi Perdana Menteri Israel yang baru.

Dalam aturan perundang-undangan Israel, seseorang yang diberi tanggung jawab membentuk koalisi di parlemen (120 kursi) tidak selalu pihak yang memenangi pemilihan, tetapi juga pihak yang memunyai peluang yang paling besar untuk membentuk koalisi. Peluang Partai kadima untuk membentuk pemerintahan koalisi kurang mendapat sambutan hangat dari partai-partai peserta pemilu yang lainnya, sebaliknya malah ajakan Netanyahu sebagai pemimpin

Partai Likud untuk membuat pemerintahan koalisi mendapat sambutan hangat dari partai peserta pemilu lainnya.

Akhinya, Partai Likud pun berhasil mengusung Benyamin Netanyahu untuk kembali menjadi Perdana menteri Israel yang baru.⁴ Benyamin Netanyahu merupakan salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah politik Israel. Hal yang menarik dari kemengangan Bibi ini adalah, jika pada sebelumnya (Pemilu Israel 1996), Bibi dan tentu saja Likud memenangi Pemilu Israel dengan mengantongi suara mutlak⁵ namun realita yang terjadi sekarang, Likud membutuhkan koalisi dari partai-partai lain untuk dapat memenangi Pemilu Israel.⁶

Pada hasil Pemilu 2009 saat ini, Likud yang dipimpin oleh Bibi memenangkan Pemilu Israel. Pada pemilu kali ini, Bibi ternyata diungguli oleh lawannya yaitu Tzeves Livni dari Partai Kadima pada pemilu di *knesset* sehingga Bibi memerlukan pemerintahan koalisi untuk membentuk pemerintahannya. Bibi kemudian berhasil membujuk parta-partai peserta Pemilu Israel untuk membentuk pemerintahan koalisi dengannya sehingga Likud berhasil menguasai 69 kursi di *Knesset*. Perolehan suara ini melampaui perolehan kursi saingan utamanya yaitu Partai Kadima. Dengan kemenangan tersebut maka Benyamin Netanyahu terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Israel.

Adapun anggota koalisi partai pimpinan perdana menteri Israel yang

⁴ Benyamin Netanyahu sebelumnya pernah menjabat sebagai PM Israel tahun 1996

⁵ pada saat itu di Israel sedang dilakukan uji coba pemilu gaya baru, yaitu dengan pemilihan perdana menteri langsung oleh rakyat (tidak melalui *Knesset*).

⁶ Pada pemilu Israel kali ini (2009) sistem pemilu kembali kepada sistem pemilu one ballot system (lewat *Knesset*)

menguasai 69 kursi di *Knesset* adalah :

1. Partai Likud (27 kursi), Partai Kanan Nasionalis.
2. Yisrael Beinetu (15 kursi), Partai Ultranasionalis.
3. Partai Buruh (13 kursi), Partai Kiri.
4. Partai Shas (11 kursi), Partai Ultra-Ortodoks.
5. Partai Jews Home (3 kursi), Partai Ultrakanan.

(sumber : Kantor berita AFP (Agence France Presse))

Kolaborasi dari partai-partai ini di parlemen tentu saja mempengaruhi kinerja Bibi ke depan dan mempengaruhi kebijakan Israel akan Palestina.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Orientasi Politik Pemerintahan Benyamin Netanyahu yang Kedua Terhadap Perdamaian Israel-Palestina?

E. Kerangka Dasar Teori

Berteori adalah suatu upaya untuk memberi makna pada fenomena yang terjadi⁷. Karena berteori adalah pekerjaan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi (deskripsi), mengapa itu terjadi (eksplanasi), dan meramalkan kemungkinan berulangnya keadaan tersebut di masa yang akan datang (prediksi). Maka untuk mengetahui Bagaimana Orientasi Politik Pemerintahan Benyamin Netanyahu yang Kedua terhadap Perdamaian Israel-Palestina, maka penulis akan mencoba menganalisis dengan menggunakan **Teori Resolusi Konflik**.

Dalam hubungan internasional terdapat banyak definisi berbeda mengenai resolusi konflik yang disampaikan oleh beberapa pakar. Namun disini penulis hanya menulis beberapa definisi yang dirasa sesuai dalam pembahasan permasalahan yang akan diulas.

Resolusi konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Resolusi konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi. Menurut Ross (1993) bahwa resolusi konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan kearah hasil tertentu yang mungkin atau tdak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin meghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Suatu

⁷. Mohtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi",

pendekatan yang berorientasi pada proses resolusi konflik menunjukkan pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.⁸

Resolusi konflik tentu saja berhubungan erat dengan perdamaian. Damai biasanya berhubungan dengan perang dan kekerasan. Perdamaian merupakan kebutuhan yang mendesak dan menekan ketika terjadi perang atau kekerasan. Namun demikian, ada beberapa kebutuhan jangka panjang yang terkait dengan perdamaian diantaranya adalah keadilan, keselarasan, dan pembangunan. Pandangan tradisional atau konservatif cenderung mengatakan bahwa perdamaian atau damai adalah ketiadaan perang. Namun sebagian orang yang berfikir moderat mengatakan itu tidak sepenuhnya benar, perang mungkin saja berakhir, namun kekerasan masih tetap berlanjut. Ada perbedaan yang mendasar antara perang dan kekerasan. Perang adalah kekerasan dalam skala besar, dan kekerasan biasanya berskala kecil namun sama-sama bertentangan dengan perdamaian. Perang mungkin saja berakhir dengan adanya perjanjian perdamaian, namun damai tersebut bersifat sementara.⁹

Pendekatan tradisional mengenai damai memang bisa sedikit diperluas maknanya, Damai adalah ketika perang dan kekerasan tidak terjadi. Pengertian tersebut mungkin saja lebih baik namun tidak sepenuhnya mencakup apa yang dibayangkan orang tentang perdamaian atau damai itu sendiri. Damai tidak hanya

⁸ Sugito, M.Si, "*Modul Negosiasi Damai Konflik Kekerasan*", Yogyakarta, 2007

⁹ Surwandono, "*The Material of Conflict Resolution for International Relations Students in International Program*", Yogyakarta, 2007

mengakhiri perang, namun juga penyebab-penyebabnya dan juga ketidakadilan yang merupakan penyebab utama dari perang tersebut.

Damai tidak hanya berarti ketiadaan perang dan kekerasan, namun juga harus ketiadaan dari penyebab perang dan kekerasan itu tersendiri. Untuk melihat dan mengetahui lebih jauh tentang perdamaian, berikut ini adalah beberapa pendekatan tentang perdamaian :¹⁰

1. Pendekatan Konservatif

Pendekatan cara ini umumnya dilakukan oleh negara-negara yang telah mapan dan mempunyai kekuatan besar. Pendekatan ini memandang skeptis pada perdamaian total, usulnya adalah dengan perdamaian terbatas. Umumnya, penganut pendekatan ini cenderung menganggap perdamaian sama dengan order dan kekerasan kekerasan diperlukan untuk menjaga ketertiban.

2. Pendekatan Pragmatis

Pendekatan ini mengasumsikan netralitas dalam berideologi, melakukan upaya pembangunan perdamaian melalui sarana yang pragmatis dan praktis. Penghentian perang merupakan salah satu tujuan utama pendekatan ini. Dalam mencapai perdamaian, mediasi oleh pihak netral dapat memainkan peran utamanya. Pelucutan senjata nuklir adalah tujuan utama. Perserikatan Bangsa-Bangsa biasanya memakai pendekatan cara ini.

¹⁰ *ibid*

3. Pendekatan Keadilan Sosial

Pendekatan ini merupakan pendekatan perdamaian positif. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada kekerasan struktural dan eliminasi. Ketidakadilan sosial seperti kemiskinan, Kelaparan, rasisme dan eksploitasi ekonomi adalah hasil dari kekerasan struktural. Untuk membangun perdamaian dalam jangka panjang isu-isu ini harus di tanggap secara positif. Pendekatan ini mengasumsikan sebuah tatanan sosial yang baru yang bisa mendorong kesetaraan, keadilan, dan harmoni sosial.

4. Pendekatan Transformasi Pribadi

Advokasi non kekerasan adalah metode utama dari pendekatan ini seperti yang dianjurkan oleh Mahatma Gandhi dan Martin Luther King. Dalam konstitusi UNESCO menyatakan :” Karena perang dimulai di dalam pikiran, maka dalam pikiran manusia juga perdamaian itu harus dibangun”

5. Pendekatan Tata Dunia.

Pendekatan ini populer di kalangan akademisi khususnya di bidang hubungan Internasional. Pembangunan ini berkaitan dengan pembangunan, keadilan, dan hak asasi manusia.

6. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ini berusaha membangun hubungan antara tiga set masalah yaitu perdamaian/perang, pengembangan/lingkungan, dan hak asasi manusia/keadilan. Pendekatan ini berpendapat bahwa semua rangkaian isu itu

berhubungan dan saling terkait. Tujuan dari pendekatan ini adalah menciptakan masa depan dan perdamaian yang berkelanjutan. Menurut penganut pendekatan ini perdamaian bukan hanya ketiadaan perang atau mediasi konflik terus menerus melainkan saling memperkuat keseimbangan antara unsur-unsur emosional, ekonomi, politik, budaya, alam, etika, dan variable teknologi. Perdamaian dianggap sebagai harmoni.

Dari berbagai cara pandang orang terhadap perdamaian tersebut, penulis memilih menggunakan pendekatan damai konservatif untuk menganalisa orientasi politik pemerintahan Bibi dalam memandang perdamaian Israel-Palestina.

Pendekatan Konservatif

Seperti yang sudah dibahas oleh penulis sebelumnya, pendekatan konservatif percaya bahwa perdamaian dilakukan melalui kekuatan dalam hal ini adalah militer dan otoritas atau kekuasaan.

“ This approach believes in crisis management. It is a skeptical about total piece. A limited peace is its ideal. It is kind of a “police” approach to peace. According to this approach, peace is equated with order, and a little bit of violence may be necessary to maintain order”

Usul utama dari pendekatan ini adalah perdamaian terbatas, pendekatan seperti ini diumpamakan seperti adanya polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai orientasi politik Benjamin Netanyahu terhadap perdamaian Israel-Palestina, pendekatan konservatif inilah yang dianggap mewakili sikap Israel terhadap Palestina.

Konsep Bibi tentang perdamaian mengandung tiga pilar utama yaitu Keamanan, reciprocity (ada timbal balik antara dua pihak) dan penguatan demokrasi. Pemikiran Bibi merupakan *self-consciously* yang dibentuk dari dua hal penting yaitu demokrasi dan kediktatoran. Kemudian diikuti dengan dua jenis perdamaian pula yaitu “*peace of democracies*” dan “*peace of deterrence*”.

Peace of Democracies atau perdamaian demokratis adalah perdamaian yang ada diantara negara-negara Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II, sedangkan *Peace of deterrence* atau perdamaian karena takut atau tunduk adalah perdamaian yang terlihat diantara negara demokratis dan negara non demokratis atau antara dua atau lebih negara non demokratis.¹¹ Bibi pernah berkata :

*“...Among democracies concession by one side usually interpreted as signs of a good faith by the other, encouraging compromise and agreement. To dictators, concessions send the opposite message, enticing them to further aggression. In the later case, only a peace of deterrence is possible.”*¹²

Jika konsep tersebut diterapkan di Timur Tengah, bagi Bibi untuk menawarkan konsesi kepada negara-negara Arab yang sangat anti demokrasi atau untuk kompromi dengan kediktatoran yang belum terbentuk dimana doktrin pemerintahannya didasarkan pada tirani dan intimidasi hanya akan membawa mereka pada peperangan. Menurutnya, perdamaian yang cocok di Timur Tengah harus didasarkan pada deterrence (pengaruh/tunduk). Perspektif ini membawa pengertian bahwa aplikasi yang tepat untuk konflik Israel - Palestina menurut Bibi

¹¹ Laura Drake, *A Netanyahu Primer*, Journal of Palestine Studies vol. XXVI no. I Autumn 1996, p. 63-64

¹² Benyamin Netanyahu, “*there are two kind of peace*”, Jerusalem post, 28 may 1993.

adalah “*peace through strength*” yang sesuai dengan perdamaian ala orang konservatif. Atas dasar hal tersebut maka tak heran jika dalam strateginya Bibi percaya pada teori konfrontasi, bahwa hanya dengan konfrontasi langsung dan keras, Arab akan menurunkan harapan - harapan tingginya. Artinya, bagi Bibi dan Likud pada umumnya, perdamaian yang diraih melalui negosiasi hanyalah ‘*imaginable deal*’.¹³ Alasannya, *pertama* karena ideologi zionismenya dan *kedua* karena hambatan psikologis antara Arab dan Yahudi yang sama-sama tak mau mengalah. Kelihatannya, perdamaian akan semakin kabur dengan naiknya Bibi, namun satu hal yang harus disadari bahwa penduduk Israel yang mendorong terciptanya perdamaian tidak lebih sedikit dari kontra perdamaian.

Konsep Bibi tentang perdamaian itu merupakan cerminan dari sikapnya yang memandang perdamaian melalui pendekatan konservatif, orang-orang seperti Bibi tidak percaya pada perdamaian total, bagaimanapun perdamaian harus dibatasi. Kekerasan itu perlu untuk menjaga perdamaian. Bahkan dalam kampanyenya Bibi juga menegaskan salah satu tujuannya, ia akan memusnahkan Hamas dan membunuh seluruh pemimpinnya. Artinya, perang akan menjadi pilihan rejim Israel yang baru dibawah Partai Likud. Banyak pihak yang berpendapat bahwa, dengan menangnya Partai Likud dalam Pemilu Israel 2009 dengan Bibi terpilih kembali sebagai Perdana Menteri akan membuat perdamaian di Timur tengah semakin jauh kemungkinan terjadinya.

¹³ why is the liquid against the peace process? Dari “simulation of Mideast Diplomay by Universty of Texas at Austin, <<http://inic.utexas.edu/meclass/aipol/mail/media96/0149.html>>.

Selain itu juga, sikap Bibi yang semakin Konservatif bisa dilihat dari rekan-rekan koalisi partainya (Partai Likud) di dalam pemerintahan. Bibi berhasil membujuk partai-partai peserta Pemilu Israel untuk membentuk pemerintahan koalisi dengannya. Likud berhasil membujuk Yisrael Beinetu yang beraliran Ultranasionalis, Partai Buruh yang beraliran kiri, Partai Shas yang beraliran Ultra-Ortodoks, serta Partai Jews Home yang beraliran Ultra kanan. Pada pemilu Israel bulan Februari 2009, Partai Likud berhasil memenangkan Pemilu di Negara tersebut dengan menguasai 69 kursi di *Knesset* (parlemen Israel). Perolehan suara ini melampaui perolehan kursi saingan utamanya yaitu Partai Kadima. Dengan kemenangan tersebut maka Benyamin Netanyahu terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Israel setelah sebelumnya ia menjadi Perdana Menteri Israel pada 1996.

Pada pemilu kali ini, koalisi Partai Likud adalah partai-partai haluan kanan yang rata-rata adalah partai yang menolak pembentukan Negara Palestina. Para pakar politik justru khawatir jika pemerintahan baru Israel benar-benar murni “pemerintahan sayap kanan”. Hal ini dikarenakan pemerintahan itu tidak akan stabil. Bahkan, kemungkinan pemerintahan itu tidak akan bertahan lebih dari 18 bulan. Para analisis Israel mengatakan, apabila Bibi berhasil membujuk partai-partai kanan tanpa Kadima dan Partai Buruh, akan tertutup kemungkinan dicapai solusi damai dengan Palestina. Namun setelah perundingan yang panjang, akhirnya Likud berhasil membujuk Partai Buruh pimpinan Ehud Olmert untuk berkoalisi dalam pemerintahan sehingga pemerintahan Bibi yang baru terhindar dari kesan pemerintahan kanan yang sempit dan Radikal. Netanyahu juga berhasil

menggandeng Partai Sekuler Kanan Yisrael Beitenu pimpinan Avigdor Lieberman. Dari kesepakatan dengan Lieberman, Ia akan mendapat jabatan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri.

Namun tetap saja, perpaduan antara cara pandang Bibi tentang perdamaian dengan mitra koalisi partai Likud yang beraliran kanan walaupun dengan Partai Buruh tetap membuat banyak pihak yakin bahwa perdamaian akan semakin jauh saja dari masa depan pemerintahan Bibi yang sekarang.

Terbukti dengan baru-baru ini Israel mengejutkan dunia internasional ketika mengumumkan akan membangun pemukiman baru untuk Yahudi di Jerussalem Timur. Jerussalem adalah kota yang sejak dulu dianggap sebagai salah satu akar konflik antara Palestina-Israel karena mereka sama-sama ingin menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota negara. Tentu saja pengumuman Israel ini mendapat kecaman dunia internasional. Apalagi pengumuman ini diumumkan beberapa saat sebelum kedatangan Wakil Presiden AS, Joe Bidden ke Israel untuk memfasilitasi perundingan damai antara Israel-Palestina yang telah macet sejak Desember 2009. Bahwa 1.600 rumah akan dibangun di Jerusalem Timur telah menyebabkan hubungan AS dan srael menjadi memburuk karena AS sangat mengecam keputusan tersebut.

Israel menguasai Jerusalem timur setelah memenangkan perang Timur Tengah 1967, namun pendudukan itu tidak mendapat pengakuan dunia internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di kota itu. Otoritas Palestina

marah dengan kekerasan Israel melakukan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan. PLO meyakinkan bahwa mereka tidak akan kembali ke meja perundingan sebelum Israel membekukan pemukiman di Jerusalem tersebut. Masalah ini dipandang sebagai penghambat untuk memulai kembali pembicaraan damai yang terhenti lebih dari satu tahun. Namun, PM Israel mengatakan bahwa penghentian pembangunan pemukiman Yahudi tersebut tidak masuk akal, karena pembangunan tersebut tidak melanggar aturan dan tidak merugikan Bangsa Arab. Desakan dari berbagai pihak termasuk juga dari AS yang mendesak Israel menghentikan proses pembangunan tersebut malah dianggap Israel sebagai proses yang memacetkan proses perdamaian yang akan berlangsung.

Selain masalah pemukiman tersebut, pemerintahan Bibi yang sekarang juga ternyata tidak menghentikan proses penggalian disekitar kompleks Mesjid Al-Aqsa yang disadari banyak pihak akan membuat Al-Aqsa hancur. Israel tetap ingin menjadikan Jerusalem sebagai ibukota negara Israel dengan cara mengikis rasa keterkaitan umat Islam (Arab Palestina) akan Jerusalem.

Israel juga dengan tegas menolak solusi dua negara (*two state solution*) yang ditawarkan oleh Amerika sebagai satu-satunya solusi yang paling masuk akal dalam konflik antara Israel-Palestina tersebut.

F. Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat hipotesa atas pokok permasalahan di atas sebagai berikut:

Orientasi Politik Pemerintahan Benyamin Netanyahu yang kedua terhadap Perdamaian Israel-Palestina adalah semakin konservatif, ditandai dengan ;

1. Koalisi Partai Likud di pemerintahan.
2. Penolakan Israel terhadap tawaran *Two State Solution*
3. Artikulasi perdamaian Benyamin Netanyahu dan sikapnya terhadap protes internasional tentang di bangunnya pemukiman Yahudi yang baru di Jerusalem Timur, dan tetap diteruskannya proyek penggalian di sekitar Al-Aqsa dalam rangka Penguasaan Israel atas Jerusalem.

G. Batasan Penelitian

Batasan penulisan skripsi ini adalah sejak tahun 1996 saat Benyamin Netanyahu pertama kali menjadi Perdana Menteri Israel sampai pada tahun 2009 saat Netanyahu terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Israel. Namun tidak menutup kemungkinan bila data yang digunakan adalah data waktu rentan sebelum tahun 1996 ataupun setelah tahun 2009 selama data yang digunakan tersebut masih relevan dengan isu yang dibahas.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yakni dengan mencari data dari berbagai buku, media cetak, media

elektronik, berbagai makalah, literature, dan beberapa situs-situs website di internet lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Dengan maksud untuk membahas permasalahan ini secara sistematis, maka penulis menyusun skripsi ini menjadi lima bagian. Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan dimana di dalamnya merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan bab yang ada. Berisi Pendahuluan, yang diawali dengan Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Batasan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang dinamika perdamaian Israel-Palestina, termasuk didalamnya menjelaskan mengenai konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Asal mula konflik tersebut, cara pandang Partai Likud tentang perdamaian, sampai dengan proses-proses perdamaian apa saja yang sudah pernah ditempuh.

BAB III berisi tentang karakter kepemimpinan Benyamin Netanyahu termasuk didalamnya mengenai sistem pemerintahan dan pemilu di Israel, dinamika politik Partai Likud, dan karir politik Benyamin Netanyahu.

BAB IV berisi tentang pembahasan tentang orientasi politik pemerintahan Benyamin Netanyahu yang kedua yang semakin konservatif.

BAB V atau bagian akhir adalah kesimpulan yang merupakan rangkuman dan penegas dari bab-bab sebelumnya.